

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMDIKBUD NO.15 TAHUN 2020
PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH BAGI SISWA DI
SMAN 8 KABUPATEN GOWA**

Disusun Dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD TESAR SYARIF

Nomor Stambuk : 105640215415



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

05/05/2021

1 exp
Smk. Alim

P/061/1PM/21 co
SYA

E

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15
Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari
Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten
Gowa

Nama Mahasiswa : Muh. Tesar Syarif

Nomor Stambuk : 105640215415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui :

Dekan Ketua

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Nuryanti Mustari.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

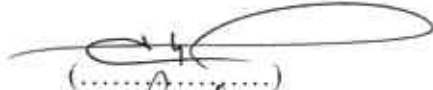
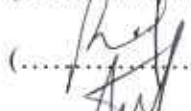
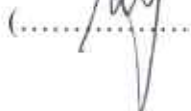
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0172/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 30 April 2021.


Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si

Penguji

1. Nasrul Haq, S.Sos, MPA (Ketua)
2. Handam, S.IP, M.Si
3. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI


(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tesar Syarif

Nomor Stambuk : 105640215415

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atauteleahditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerimasanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar , April 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Tesar Syarif

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Teknologi Terhadap Siswa Di SMAN 8 Kabupaten”, yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Termasuk dalam penyusunan skripsi ini terdapat bermacam rintangan dan hambatan serta kendala yang peneliti hadapi, namun berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, semuanya bisa diselesaikan.

Penghargaan dan rasa terima kasih tak terkira dan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Syarifuddin, Ibunda Sari Puspa, Kakek dan Nenek serta Saudara-Saudari saya yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak A Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan II sekaligus Penasehat Akademik
4. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku Pembimbing I.
7. Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
9. Para pihak Sekolah yang ada pada lingkup SMAN 8 Kabupaten Gowa yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada kepala sekolah dan guru-guru serta orang tua siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa yang telah membantu melakukan penelitian
11. Kepada seluruh keluarga besar di Pikom IMM FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Kepada sahabat,teman-teman terutama untuk sodara saya Muzakkar, Risman, Khalifah, Aidil, Reza,Iqbal,Zulfikran,Rival,sabri,Ida,uyyun,yeyen,syifa,asmita semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini, maka saran dan kritikyang membangun sangat dibutuhkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.Teringin doa Jazakumuullaahu Khairan Katsira.

Billahi fii sabilihq fastabiqhul khaerat.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, April 2021

Peneliti

ABSTRAK

MUH TESAR SYARIF, 2021. Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nasrulhaq)

Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Dengan jumlah informan penelitian adalah 9 orang dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa telah diterapkan oleh Sekolah yang bersangkutan yaitu SMAN 8 Kabupaten Gowa sesuai dengan tahap BDR belajar dari rumah yang di keluarkan oleh pemerintah untuk di jalankan serta membantu guru beserta siswa kemudian dengan tahap pelaksanaan (*Implementation*) guru memberikan binaan kepada siswa, untuk dapat melakukan pembelajaran daring tersebut dengan bijaksana. Namun perlu adanya kerja sama tidak hanya sekolah beserta kepala sekolah dan guru, orang tua siswa pun harus membekali anaknya pembelajaran dari rumah ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Belajar Dari Rumah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep Implementasi	13
C. Konsep Kebijakan	19
D. Belajar Dari Rumah	42
E. Kerangka Pikir	48
F. Fokus Penelitian.....	49
G. Deskripsi Fokus Penelitian	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Tipe Penelitian	51
C. Sumber Data	52
D. Informan Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

G. Teknik Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	57
B. Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa.....	68
C. Faktor-faktor yang mendukung dan Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa	77
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.0 Informan Penelitian.....	48
Tabel 3.0 Luas Wilayah di Kabupaten Gowa.....	54
Tabel 3.0 Luas Wilayah Kecamatan Bontomarannu.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi Covid19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya menyerang negara Indonesia namun juga melanda dunia. Keberadaan Covid19 membuat masyarakat untuk memberhentikan aktivitas di luar rumah yang semestinya dilakukan seperti pada hari-hari biasa. Masyarakat harus menjaga jarak aman atau disebut dengan *physical distancing*, keadaan di mana orang-orang dikarantina dan diisolasi di dalam rumah masing-masing termasuk dalam melaksanakan pekerjaan sehingga setiap individu yang rentan tidak akan tertular virus Covid19.

Apabila masyarakat ingin keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat diwajibkan menggunakan masker dan tentu dengan menjaga jarak aman dengan orang lain. Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. WHO (*World Health Organization*) sejak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini (Sebayang, 2020).

Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan pembaharuan kebijakan untuk diterapkan. Kebijakan baru juga terjadi pada dunia pendidikan merubah pembelajaran yang harus datang ke kelas, menjadi cukup di rumah

saja. Anjuran pemerintah untuk *stay at home and physical and social distancing* harus diikuti dengan perubahan modus belajar tatap muka menjadi online. Bekerja dari rumah atau *Work From Home* yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat (15 Maret 2020).

Presiden mengimbau agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Karena imbas dari munculnya virus ini di bidang pendidikan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan surat edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat Penyebaran *Corona Virus Diseases-19*. Agar dapat memutus rantai penyebaran virus ini pemerintah menganjurkan untuk menutup kegiatan pembelajaran di sekolah dan menerapkan pembelajaran daring (*online*). Kegiatan belajar dari rumah yang diterapkan oleh masyarakat menyebabkan siswa dan guru kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain dalam menjalin hubungan sosial, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama manusia, kehilangan rasa peduli dan empati. Kegiatan yang seharusnya siswa dan guru lalui memberikan pembelajaran tidak hanya tentang materi pelajaran namun juga menyampaikan tentang pentingnya bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan ini belum bisa dilaksanakan karena adanya himbauan *physical distancing* dari pemerintah guna melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus Covid19.

Belajar dari rumah tentu berbeda dengan kegiatan belajar di sekolah, selain

adanya perangkat pembelajaran kegiatan belajar juga didukung oleh media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Menurut Indriana (2011) media pembelajaran dimaksudkan merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses pembelajaran terdapat proses penyampaian pesan dari pendidik kepada anak didik. Media pembelajaran juga diartikan sebagai salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran, secara umum manfaat media pembelajaran yakni untuk memperlancar interaksi anatar guru dengan siswa sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien (Numiek, 2013). Kegiatan belajar dari rumah akan membutuhkan media pembelajaran yang dibutuhkan siswa, agar siswa mudah memahami materi pelajaran. Pada kondisi ini akan sulit memberikan media pembelajaran karena orang tua kurang berpengalaman dalam mengajarkan anak materi dari sekolah dan siswa membutuhkan media pendukung sebagai sarana kelancaran belajar. Terdapat beberapa hal dalam mempertimbangkan memilih media pembelajaran yang tepat, menentukan ketepatan dalam memilih media akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.

Media yang digunakan belum tentu merupakan media yang mahal dan modern, namun sebaliknya jenis media yang harganya murah dan sederhana yang mudah dibuat serta mudah didapatkan mungkin lebih efektif dan efisien. Salah satu cara dalam mengatasi pembelajaran siswa dan guru di sekolah dengan mengubah sistem pembelajaran di rumah yakni menggunakan sistem pembelajaran *online* atau daring. Pembelajaran *online* dilakukan

menggunakan gadget masing-masing baik berupa *smartphone*, laptop, komputer, atau tablet. Penggunaan pembelajaran *online* dirasa merupakan strategi yang tepat dalam menggantikan pembelajaran di kelas. Perubahan strategi belajar tentu dilengkapi dengan media belajar yang baru, sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Pada kondisi ini pergantian sistem pembelajaran biasa menjadi pembelajaran *online* diikuti pula dengan media belajar lain yaitu media internet. Penerapan pembelajaran *online* dapat berjalan dengan lancar dan stabil bila dibantu oleh adanya koneksi jaringan internet yang akan diakses pada perangkat gadget.

Media pembelajaran mempunyai fungsi sebagai sumber belajar dan dapat sebagai sarana perantara dalam penyampaian informasi, maka dari itu media pembelajaran memiliki peran penting dalam penggunaan sistem pembelajaran *online* pada masa pandemi Covid19. Jadi, pembelajaran *online* yang diterapkan pada masa pandemi Covid19 merupakan strategi baru yang diterapkan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan siswa yang dapat dilaksanakan dari rumah, kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan media internet agar dapat efektif dalam penerapannya. Pada pelaksanaannya siswa dan guru tidak perlu lagi melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di ruang kelas, namun kini sudah bisa belajar dengan sistem pembelajaran *online*.

Guru memberi tugas harian sebagai sarana pemerolehan nilai siswa yang akan dicantumkan dalam rapor. Penilaian tersebut sebagai acuan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan di tengah wabah virus

Covid19. Berbicara mengenai mendidik anak, orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak-anak. Para orang tua yang menentukan masa depan anak. Keluarga dan lingkungan adalah jalur pendidikan informal. Di dalam keadaan yang normal, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Karena disanalah anak mulai mengalami proses sosialisasi awal, serta mengenal dunia sekitarnya, juga pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari (Mamah, 2016).

Namun dalam mengakui keterbatasan dan peluang yang dimiliki, sehingga orang tua meminta pihak luar lain membantu mendidik anak-anak mereka, pihak lainnya adalah guru di sekolah. Namun demikian, setelah anak-anak dititipkan di sekolah, orang tua tetap untuk bertanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan anak-anak mereka (Sukmadinata, 2009). Peran orang tua sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak-anak mereka. Induk peran dan tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dengan membimbing kelangsungan anak belajar di rumah sesuai dengan program yang telah dipelajari oleh anak-anak disekolah belajar (Sukmadinata, 2009).

Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini pendekatan pembelajaran telah berubah ke arah pembelajaran abad pengetahuan. Orang dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itulah ciri pembelajaran abad pengetahuan yang dikenal sebagai berbasis komputer (Kuntarto, 2017). Teknologi internet juga berdampak terhadap perilaku dan kehidupan generasi masa kini. Anak-anak masa kini begitu akrab dengan internet melalui berbagai perangkat gawai, seperti: komputer, laptop, tablet,

handphone, smariphone, dan perangkat sejenisnya. Kehidupan mereka mulai dari; bermain, berkomunikasi, bergaul, menyalurkan hobi, dan aspek-aspek lainnya tidak terlepas dari teknologi internet. Namun satu hal yang disayangkan adalah internet masih sangat kecil digunakan untuk keperluan pembelajaran (Chalim, 2018).

Perkembangan teknologi yang demikian pesat, terutama teknologi komunikasi membawa perubahan besar dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang juga berkembang sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi ini adalah bidang pendidikan dan pembelajaran. Jika waktu-waktu sebelumnya hubungan antara pendidik - peserta didik hanya berlangsung melalui kegiatan tatap muka, dibatasi oleh sekat ruang dan waktu, atau melalui media cetak, ternyata saat ini telah dapat dikembangkan melalui komunikasi online yang menembus sekat-sekat ruang dan waktu. Melalui media elektronik ini, disamping banyak nilai tambah atau katakanlah "keunggulan" atau kelebihan, dari dimensi pedagogis tentu banyak faktor yang patut dicermati, misalnya bagaimana pergeseran pola komunikasi edukatif antara guru dan siswa, bagaimana dengan teknik-teknik pemotivasian belajar, bagaimana dengan pemahaman peserta didik, dan beberapa aspek psikologi belajar lainnya. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan lainnya sebagainya member arti sendiri bagi kegiatan pendidikan dan tuntutan inilah yang membuat kebijaksanaan untuk memanfaatkan media teknologi dan pendekatan

teknologis dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan merupakan sarana penerus nilai-nilai, gagasan-gagasan, sehingga setiap orang mampu berperan serta dalam transformasi nilai demikemajuan bangsa dan Negara (Annurahman, 2009).

Pada era reformasi pilihan terhadap sistem desentralisasi semakin dipertegas dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan termasuk wilayah penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada daerah melalui otonomi daerah. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional” Pasal 50 ayat 4“ Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dan Pasal 50 ayat 5 yang berbunyi pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 yang selanjutnya di undang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah pada

pasal 12 menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggungjawab daerah yang harus mengurusinya.

Guru sebagai orang yang setiap hari berinteraksi dengan siswa memiliki peran penting untuk dapat memotivasi siswa agar siswa tersebut terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Tugas guru adalah membangkitkan motivasi anak, sehingga ia mau melakukan belajar. Sedangkan tugas guru dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 berbunyi "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" (Usman, 2008). Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah lengkapnya fasilitas yang dapat menunjang proses pembelajaran. Proses belajar mengajar akan efektif dan efisien apabila ditunjang dengan lengkapnya fasilitas yang dibutuhkan oleh siswa selama menjalani proses pembelajaran. Fasilitas belajar akan memperlancar proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diberikan guru kepada siswa. Selain itu peranan guru dalam proses mengajar sangat penting karena keterlibatan guru dalam penggunaan fasilitas dalam proses belajar mengajar. Apabila kondisi fasilitas kurang memadai maka proses belajar mengajar pun akan kurang optimal dan efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran masalah di atas peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa?
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai Permasalahan diatas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8
Kabupaten Gowa

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Kebijakan No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah, terkhusus di SMAN 8 Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.0 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khoirunissa (2020)	Pembelajaran <i>Online</i> Pada Masa Pandemi Covid19 Sebagai Strategi Pembelajaran dan Capaian Hasil Belajar Pada Siswa Kelas 3B MI Al-Ittihaad Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran <i>online</i> yang diterapkan pada kelas III B MI Al-ittihad Citrosono merupakan suatu tantangan baru bagi guru dalam mengatur ulang strategi pembelajaran agar materi belajar dapat tersampaikan kepada siswa.
2.	Ade Romadoni (2020)	Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Di SMK NU Unggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa didapatkan menjadikan siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi, berfikir kritis dan memiliki keterampilan pemecahan masalah.
3.	Siti Nur Khalimah (2020)	Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Di Midarul Ulum Pedurungan Di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran <i>konvensional</i> , orang tua melaksanakan dua peran sekaligus, pertama menjadi orang tua, kedua menjadi guru di rumah menyiapkan sarana dan prasarana bagi anak untuk belajar.

No.	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Tiara Cintiasih (2020)	Implementasi Model Pembelajaran <i>Daring</i> Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kelas 3 SD Ptq Annida Kota Salatiga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi model pembelajaran daring pada kelas III yaitu dengan memanfaatkan beberapa macam jenis aplikasi seperti <i>whatsapp</i> , <i>google form</i> , <i>google meet</i> dan <i>kine master</i> untuk membuat video pembelajaran.
5.	Galuh Astri Zunaika (2020)	Implementasi Pembelajaran <i>Daring</i> di Madrasah Ibtidaiyah Study Pada Guru MI Istiqomah Ma'arif NU Mojokerto Kabupaten Sragen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru mengacu pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 20 tentang guru dan dosen menyatakan guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran.

Dari kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran konvensional sangat jauh berbeda. Teknologi yang digunakan sangat berpengaruh oleh proses serta hasil belajar siswa di rumah maupun di sekolah. Sedangkan peneliti mengangkat Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa menerapkan dua tahapan demi terwujudnya suatu pembelajaran yang baik yakni, tahap pemutusan (*termination*) dan tahap pelaksanaan (*implementation*).

2. Teori-teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sah. Suharsono, mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk

mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan memaparkan metode pengajaran yang diugunakan (Usman, 2002). Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guruterjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap (Usman, 2002). Memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi

dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program- program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain dokumentasi (Usman, 2002).

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Setiawan, 2004). Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide,program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan- perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya

pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi, 2015).

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Mulyadi, 2015). Mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Tahir, 2014). Implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (Tahir, 2014). Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat swasta dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tahir, 2014). Implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati (Widodo, 2014). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Widodo, 2014).

Implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Aditya, 2016). Implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui

hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi (Mulyadi, 2015). Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Mulyadi, 2015).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Waluyo, 2007). Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Waluyo, 2007). Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap. Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi afektif, kognitif dan psikomotorik bagi pelaksana kegiatan tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam *oxford advance learner's dictionary* sebagai yang dicatat oleh Oemar Hamalik penulis buku yang berjudul Dasar - dasar Pengembangan Kurikulum, bahwa "implementasi adalah

"*put something into effect*" atau penerapan sesuatu yang memberikan efek (Waluyo, 2007).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

(Agustino, 2008), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

C. Konsep Kebijakan

1. Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah 17 implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap atau kecendrungan (*disposition*)

Para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi

Pelaksana koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Lester dan Stewart menyebutkan, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Kemudian Lester dan Stewart juga menyebutkan Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012). Implementasi kebijakan tidak

lepas dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa (Subarsono, 2012).

Hill dan Hume mengatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Disini terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuatan keputusan dan pihak implementor (Handoyo, 2012). Menurut Thomas R. By (dalam Winarno, 2012) kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan kebijakan publik menjadi hak prerogatif pemerintah pusat baik itu lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu seharusnya menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang di pilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut. Berbagai pendapat dari beberapa definisi tentang kebijakan publik diatas, maka dapat di simpulkan bahwa serangkaian keputusan aktor politik dengan melihat fenomena sosial yang terjadi terkait

tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat. Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan disebut *stakeholder*.

Kemudian yang dimaksudkan mengenai lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan, sebagaimana yang digambarkan Dunn 1999 (Subarsono, 2005). Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu para individu atau kelompok individu akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan secara strategi dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten dalam (Subarsono, 2005) yang

berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, *beneficiaries* (penerima program) dan organisasi pelaksana program, meskipun hampir sama namun pandangan Korten dalam (Subarsono, 2005) lebih sempit dibanding pendapat Dunn.

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan (Agustino, 2006). Riant Nugroho (2008) mengatakan bahwa kebijakan adalah berkenaan dengan aturan yang mengatur pelaksanaan sistem yang tercakup di dalamnya dan cara mencapai tujuan tersebut. Kebijakan harus sejalan dengan konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Kebijakan dipahami sebagai kebijakan di bidang untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008) menyatakan bahwa evaluasi merupakan langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi, evaluasi kebijakan memberikan informasi yang memperbolehkan *stakeholders* mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Dalam kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan

untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan sesuai sasaran. Evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program. Dunn dalam Syafaruddin (2008) mengatakan evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, *evaluation* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan.

Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Memahami apa yang telah terjadi setelah sebuah program ditetapkan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Para ahli ilmu-ilmu sosial berpandangan bahwa proses implementasi kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan akan berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses pengimplementasian kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan.

Grindle, 1984 (dalam Hasbullah, 2015) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan hanya bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, tetapi lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan pendidikan tersebut. Pengukuran implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan program dilihat pada aksi (*action*) program berbasis proyek individual dan pencapaian program. Implementasi kebijakan merupakan hal terberat dalam suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang akan terjadi dan terkadang tidak dapat dijumpai di dalam konsep.

Dalam menekankan masalah yang dapat terjadi, maka diperlukan teori yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan. Konsep implementasi kebijakan paling sedikit memiliki tiga makna, yakni pertama, implementasi sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan; kedua, implementasi sebagai suatu keadaan akhir pencapaian tujuan kebijakan (*output*); dan ketiga, implementasi sebagai proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan. Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012) berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut, yaitu: a. pengorganisasian, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program sehingga

program bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan; b. interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima dengan baik serta dilaksanakan; serta c. aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Tiga diantaranya yang paling menonjol menurut Arif Rohman (2012), adalah teori yang dikembangkan oleh:

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka dibutuhkan beberapa syarat yaitu kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Untuk melaksanakan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

b. Van Meter dan Van Horn

Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini disebut sebagai Model Proses Implementasi Kebijakan (*A Model of the Policy Implementation Process*). Tipologi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dibedakan menjadi dua hal, yaitu: pertama, jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. Kedua,

jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Berdasarkan dua indikator ini maka implementasi kebijakan akan berhasil manakala pada satu segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain adalah kesepakatan terhadap tujuan dari para pelaku atau pelaksana dalam mengoperasikan program relatif tinggi.

c. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini disebut sebagai '*a frame work for implementation analysis*' atau Kerangka Analisis Implementasi (KAI). Peran penting dari KAI dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam implementasi tersebut selanjutnya dapat diklarifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu: a) mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan; b) kemampuan dari keputusan kebijakn untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; c) pengaruh langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Teori Grindle dalam buku Kebijakan Pendidikan (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008) menjelaskan bahwa teori ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa

setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Selain itu, Grindle dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in The Third World* (1980) mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh konten (isi) program/*policy* dan konteks implementasinya, sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

- 1) Kepentingan yang Dipengaruhi Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak maka implementasinya akan lebih mudah, karena tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
- 2) Jenis Manfaat yang Dihasilkan Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3) Derajat/Jangkauan Perubahan yang Diinginkan Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, maka akan semakin sulit untuk dilaksanakan.

4) Kedudukan Pembuat Kebijakan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dan kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris) akan semakin sulit implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

5) Pelaksana Program

Apabila pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

6) Sumber Daya yang Dikerahkan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan sendirinya mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan, karena akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Arif Rohman (2012) mengatakan ada tiga faktor yang biasanya menjadi sumber kegagalan keberhasilan, yaitu:

a. Rumusan Kebijakan

Oberlin Silalahi mengatakan pembuat kebijakan atau *decision maker* harus terlebih dahulu mencapai beberapa konsensus diantara mereka mengenai tujuan-tujuan, serta informasi yang cukup mencapai tujuan. Merumuskan kebijakan harus jelas, tepat, dan mudah dipahami.

b. Personil Pelaksana

Faktor ini menyangkut tentang tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut. Termasuk dalam faktor personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian dari masing-masing. Kesemuanya itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan personil pelaksana memiliki peran dalam implementasi kebijakan.

c. Organisasi Pelaksana

Faktor ini menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah birokrat pendidikan.

Adanya hubungan rumusan kebijakan, personil pelaksana, dan organisasi pelaksana merupakan sumber faktor kegagalan sekaligus keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan sehingga diperlukan persiapan yang matang ketika akan mengimplementasikan kebijakan.

Suatu kebijakan diambil dan diputuskan karena adanya suatu permasalahan. Masalah biasanya muncul karena adanya kesenjangan antara dunia cita-cita dan dunia nyata. Sedangkan dalam kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata. (Arif Rohman, 2009).

Menurut Hugh Heelo, kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut berwujud amat sederhana dan kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun privat. Dari penjelasan beberapa tokoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kebijakan di buat dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut dibuat melalui berbagai pedoman, tindakan, program mengenai aktivitas- aktivitas tertentu yang sudah terancang dengan rapi. Suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk selanjutnya diimplementasikan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati, terlebih yang menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro. Hampir setiap perumusan kebijakan dilandasi atas berbagai

macam teori. Dan berikut ini terdapat lima teori perumusan kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman (2009), yaitu:

a. Teori Radikal

Teori radikal menekankan bahwa kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan yang di ambil yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah diserahkan ke daerah. Jadi pemerintah tidak perlu repot-repot untuk menyusun rencana kebijakan pendidikan jika pada akhirnya kurang sesuai dengan kondisi lokal. Kebijakan pendidikan yang di buat setiap daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah itu sendiri. Jadi teori radikal ini sangat menghargai *desentralisasi* dalam perumusan kebijakan pendidikan.

b. Teori Advokasi

Teori advokasi tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan seperti karakteristik lembaga, lingkungan sosial dan kultural, lingkungan geografis, serta kondisi lokal lainnya. Menurut teori ini, segala macam perbedaan tersebut hanyalah berdasarkan pengamatan empirik saja. Sebaliknya teori advokasi ini, lebih mendasarkan pada pada argumentasi yang rasional, logis dan bernilai. Sehingga pemeerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang sangat bersifat nasional demi kepentingan umum, serta demi melindungi lembaga-lembaga dan organ-organ pendidikan yang relatif

masih marginal dibanding lembaga atau organ pendidikan lain yang sudah maju. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus mampu menyeimbangkan kemajuan pendidikan antar daerah.

c. Teori Transaktif

Teori transaktif menekankan bahwa perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama terlebih dahulu dengan semua pihak-pihak yang terkait, termasuk personalia lembaga pendidikan di tingkat lokal. Hasil dari proses diskusi tersebut kemudian dievolusikan terlebih dahulu secara perlahan-lahan. Pada dasarnya, teori ini sangat menekankan harkat individu serta menjunjung tinggi kepentingan (keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai) masing-masing individu untuk di ajak bersama dalam perumusan kebijakan pendidikan.

d. Teori Sinoptik

Teori Sinoptik lebih menekankan bahwa dalam menyusun sebuah kebijakan supaya menggunakan metode berfikir sistem. Obyek yang dirancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dengan tujuan yang sering disebut dengan "misi".

e. Teori Incremental

Teori inkremental menekankan perumusan kebijakan pendidikan dibuat hanya dalam berjangka pendek, serta berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir masalah-masalah yang sulit

diprediksi karena pergantian tahun maupun periode. Teori ini juga beranggapan bahwa perumusan kebijakan lebih baik dilaksanakan dalam jangka pendek karena dirasa relevan pada saat itu juga. Berdasarkan lima teori di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing teori memiliki kekhasan dan implikasi positif maupun negatif sendiri-sendiri bila diterapkan. Beberapa teori tersebut akan tepat atau memberikan dampak positif apabila diterapkan pada konteks masalah yang relevan. Jadi semua teori dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu juga.

Menurut pandangan ahli-ahli dalam ilmu sosial dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut (Arif Rohman, 2009). Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009) dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: (1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa dijalankan; (2) interpretasi, yaitu aktifitas

menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Implementasi kebijakan yang bersifat khas adalah tidak ada perbedaan pembebasan sekolah antara murid kaya dan miskin. Logika yang berkembang adalah pendidikan bersifat subsidi silang (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai proses dalam melaksanakan atau mengoperasikan sebuah program atau kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai tiga pilar dalam mengoperasikan atau melaksanakan program. Tiga pilar tersebut adalah pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. mengatakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain. Kemudian, secara lebih singkat, merumuskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak

atautidak bertindak.

Dasar hukum kebijakan (Surat edaran no.15 tahun 2020)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Oleh karena itu terdapat 4 indikator atau tujuan pelaksanaan belajar dari rumah dari kebijakan surat edaran yang di keluarkan oleh kemdikbud surat edaran no.15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *corona virus disease* (covid 19) yaitu :

- a. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama covid 19
- b. Melindungi warga satuan pendidikan dari pencegahan covid 19
- c. Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 di satuan pendidikan
- d. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta pendidik, peserta didik dan orang tua/wali

Edward iii dalam Arifin (2016) faktor penghambat dan pendukung dalam pendekatan studi implementasi kebijakan dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik

a. Faktor pendukung

1) Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, regulasi aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku dalam menjalankan kebijakan. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-

batasan tertentu. Regulasi tersebut bersifat mengikat dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam ruang lingkup kebijakan, yang jelas dalam penerapan pembelajaran daring belajar dari rumah oleh pemerintah pusat dari keluarnya surat edaran kemdikbud no.15 tahun 2020 penyelenggaraan belajar dari rumah adanya keselarasan bagi pemerintah setempat yang telah mengeluarkan yaitu surat no.188 perihal tindak lanjut pencegahan penularan covid 19 di Kabupaten Gowa mempertimbangkan pembelajaran serta meliburkan proses pembelajaran sehingga dapat mencegah penularan dari virus covid 19 itu sendiri. Karena kebijakan apa saja harus melalui regulasi yang jelas dalam pengeluran suatu kebijakan.

- 2) Penggunaan dan pemahaman berteknologi merupakan alat utama yang digunakan guru selama proses pembelajaran daring. Adanya teknologi akan mempermudah guru untuk memberikan materi dan intruksi-intruksi terkait dengan proses pembelajaran. pembelajaran daring siswa lebih banyak mengerti persoalan pemakaian gawai atau teknologi sehingga Sumber belajar lebih luas, tidak hanya terbatas dari buku pegangan. Dengan penggunaan internet pembelajaran daring siswa lebih banyak mengerti persoalan pemakaian gawai atau teknologi sehingga Sumber belajar lebih luas, tidak hanya terbatas dari buku pegangan. Dengan penggunaan internet membuat siswa lebih leluasa untuk mencari sumber belajar lain. Siswa dapat belajar di mana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar. Pemakaian

teknologi juga dapat membantu serta menyulitkan pemakainnya tergantung internet yang digunakan teknologi tersebut sehingga ada perbedaan yang di dapat oleh pengguna teknologi sehingga harus ada keselarasan dari teknologi dengan internet yang digunakan sehingga dapat digunakan dengan baik. Hal ini memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas sambil mengerjakan pekerjaan rumah.

b. Faktor penghambat

1) Sumber daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Wewenang di sini terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif, karena tidak sedikit pelaksana kebijakan memiliki wewenang formal yang besar tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyediaan fasilitas tersebut. Sedangkan untuk kualitas finansial dan tenaga sendiri cukup baik. Sikap ini akan menurunkan resistensi bagi lingkungan serta dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan. Fasilitas seperti sarana dan prasana seperti fasilitas fisik ketersediaan *handphone* atau fasilitas

internet seperti bentuk jaringan internet dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, dan wewenang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif dari memberi bantuan pembelajaran sampai memahami penggunaan teknologi.

2) Komunikasi

menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Serta ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi

komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.



D. Belajar Dari Rumah (BDR)

1. BDR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). "Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid-19," Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. "Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai Covid-19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan.

Prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta

didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. "Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik aktivitas dan penugasan BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. "Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif, serta mengedapankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua

Pembelajaran menurut Usman (2012) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi yang edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran *online* atau disebut juga *E-learning* merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh penggunaan alat dan konten digital. Pembelajaran *online* melibatkan beberapa bentuk interaktivitas termasuk berupa interaksi *online* yang dilakukan antara pendidik dengan siswa. Pembelajaran ini diakses melalui jaringan internet, dan *E-learning* lebih disebut dengan pembelajaran melalui internet atau jaringan. Dan juga BDR sendiri dapat diartikan belajar daring. Menurut Bilfaqih dan Qomarudin (2015) pembelajaran daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring web. Setiap mata kuliah/

pelajaran menyediakan materi dalam bentuk rekaman video atau *slideshow*, dengan tugas-tugas harian, mingguan yang harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan dan beragam sistem penilaian. Atau dengan kata lain pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas.

Pembelajaran daring bisa didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang penyampaian materinya dilakukan lewat internet secara langsung atau tidak langsung. Pembelajaran daring biasanya dikenal dengan *e-learning*, pembelajaran virtual, pembelajaran dengan media komputer, pembelajaran berbasis web, dan pembelajaran jarak jauh. Semua istilah ini menyiratkan bahwa pelajar dan pengajar berada dalam lokasi yang berbeda, menggunakan media teknologi digital (biasanya komputer) untuk mengakses materi pembelajaran dan berkomunikasi dengan dosen/guru dan teman kapan saja mereka bisa (Sanjaya, 2020).

2. Menjaga Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol

kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan seluruh kegiatan dilakukan melalui sosial media *WhatsApp Group* mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk membatasi kegiatan tatap muka secara langsung. Penggunaan *WhatsApp* sebagai media edukasi berbasis internet dan smartphone telah diteliti dan terbukti efektif meningkatkan status kesehatan masyarakat. Di era digital dan pandemi, media sosial menjadi peluang praktis kesehatan untuk menyampaikan informasi kesehatan. Aplikasi *WhatsApp* memiliki kelebihan mudah untuk diakses dan *cost effective*. Menurut Jessica Moudy, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor faktor yang bisa menyebabkan dan terinfeksi virus ini, yaitu:

- a. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar

rumah atau di tempat umum.

- d. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- e. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah

Dan mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

- 1) Jaga kebersihan tangan

Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor.

- 2) Jangan menyentuh wajah

Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut.

- 3) Terapkan etika batuk dan bersin

Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita.

- 4) Pakai masker

Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ke mana pun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

- 5) Jaga jarak

Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

6) *Isolasi mandiri*

Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah.

7) *Jaga kesehatan*

Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kajian teori yang telah diuraikan, maka skema kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1.0 berikut ini:



Gambar 1.0 Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah di SMAN 8 adalah sebuah pembelajaran dari rumah atau BDR yang di laksanakan oleh sekolah. Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama covid 19
- materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing- masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR.

- b. Melindungi warga satuan pendidikan dari pencegahan covid 19

BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi covid19, serta mencegah dari penularan virus covid 19.

- c. Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 di satuan pendidikan

Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR.

- d. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta pendidik, peserta didik dan orang tua/wali

Suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara gurudengan orang tua/wali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Sistem Informasi Teknologi Terhadap Anak di SMAN 8 Kabupaten Gowa adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada SMAN 8 Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi (Sugiyono:2012).

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi sekap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap sesuatu kondisi, dan sebagainya.

C. Sumber Data

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dan hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu implementasi sistem informasi teknologi di SMAN 8 Kabupaten Gowa.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari jurnal-jurnal, beberapa Dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan implementasi sistem informasi teknologi di SMAN 8 Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive sampling*.

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, adapun yang akan menjadi informan adalah:

Tabel 2.0 Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Islamuddin, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah	1
2	Rahmah Radjab Bakri, S.Pd.	Guru	1
3	Sitti Rachmawaty, S.Pd.	Guru	1
4	Megawati, S.Pd.	Guru	1
5	Dra. Andi Azrini	Guru	1
6	Dewi	Orang Tua siswa	1
7	Lukman	Orang Tua siswa	1
8	Irnawaty Hadi	Orang Tua siswa	1
9	Darmawaty	Orang Tua siswa	1
Total Informan			9

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen, sebagaimana penjelasan berikut :

1. Observasi

Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan implementasi sistem informasi teknologi terhadap siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa. Interview (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan para informan yang ada.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan pelaksanaan implementasi sistem informasi teknologi di SMAN 8 Kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti untuk mengetahui dan mengungkapkan tentang pelaksanaan kualitas implemenasi pelaksanaan sistem informasi teknologi terhadap siswa, Kepala sekolah pelaksana sistem informasi teknologi di SMAN 8 Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini diperoleh

dari SMAN 8 Kabupaten Gowa yang berupa informasi mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan atau tata cara penggunaan yang dilaksanakan.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Artinya dari data yang diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Model analisis data yang digunakan adalah analisis data Model Interaktif. Model Interaktif terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan berlanjut terus setelah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

3. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan pengolahan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang ada.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi metode dan sumber. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik antara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dikategorikan absah apabila hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut sejalan, tidak bertentangan dan menunjukkan kesamaan arti dan makna. Sedangkan teknik triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan dari suatu informasi yang telah diperoleh peneliti dari sumber lain yang berbeda. Ditunjukkan dengan adanya kesamaan antara data hasil pengamatan dengan wawancara, adanya kesamaan hasil wawancara antara informan satu

dengan informan lain, adanya kesamaan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

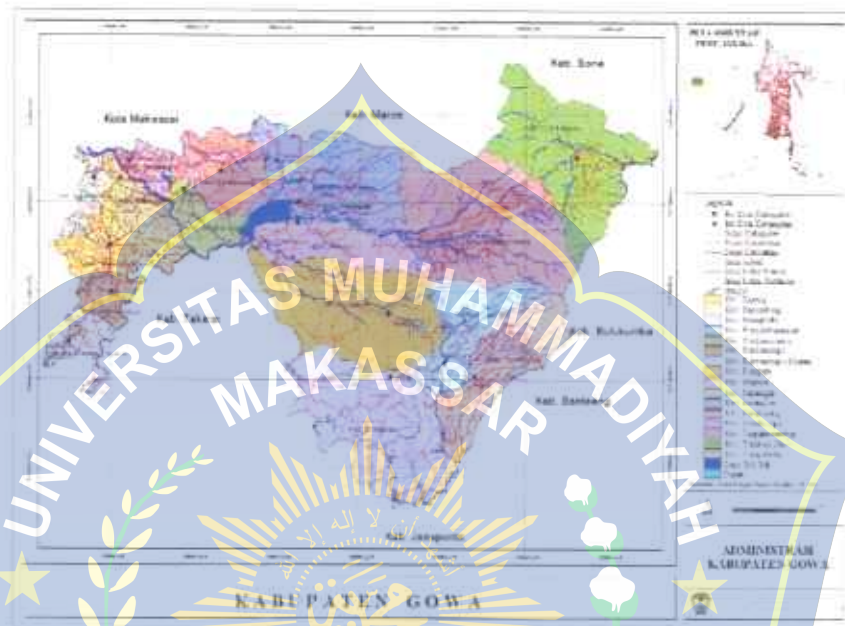
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur serta, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dimana wilayahnya terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah $1.883,33 \text{ km}^2$ atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten lain, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Bone
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- d. Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas $1.509,87 \text{ km}^2$ atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Tinggimoncong, Parigi, Parangloe, Tompobulu, Tombolo Pao, Bungaya, Biringbulu, Bontolempangan, dan Manuju. Sedangkan dataran rendah $373,46 \text{ km}^2$ atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Somba Opu, Pallangga, Pattalassang, Bontomarannu, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan.

Gambar 2 : Peta Wilayah KabupatenGowa



Dari total luas wilayah KabupatenGowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40° yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan, dan Toppobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah KabupatenGowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 km² dengan Panjang 90 km.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah KabupatenGowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasasebagai Ibukota KabupatenGowa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun

2015

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Dari Ibu Kota Kab.	Luas
1	Bontonompo	Tallayang	16 km	30,39 km ²
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30 km	29,24 km ²
3	Bajeng	Kalebajeng	12 km	60,09 km ²
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80 km	19,04 km ²
5	Pallangga	Mangngalli	2,45 km	19,04 km ²
6	Barombong	Kanjilo	6,5 km	20,67 km ²
7	SombaOpu	Sungguminasa	0,00 km	28,09 km ²
8	Bontomarannu	Borongloe	9 km	52,63 km ²
9	Pattalassang	Pattalassang	13 km	84,96 km ²
10	Parangloe	Lanna	27 km	221,26 km ²
11	Manuju	Bilalang	20 km	91,90 km ²
12	Tinggimoncong	Malino	59 km	142,87 km ²
13	Tombolo Pao	Tamaona	90 km	251,82 km ²
14	Parigi	Majannang	70 km	132,76 km ²
15	Bungaya	Sapaya	46 km	175,53 km ²
16	Bontolempangan	Bontoloe	63 km	142,46 km ²
17	Tompobulu	Malakaji	125 km	132,54 km ²
18	Biringbulu	Lauwa	140 km	218,84 km ²

Sumberdata : sekretariat DPRD KabupatenGowa 2020

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh pemerintah KabupatenGowa yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM BILI-BILI dengan luas +2415 km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas +2415 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat KabupatenGowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit listrik tenaga yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Gowa hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan desember hingga maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan yaitu bulan april sampai mei dan bulan oktober sampai november.

Berdasarkan data dalam angka bahwa penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2015 tercatat sebanyak 747.257 jiwa yang terdiri 259.048 jiwa penduduk laki-laki dan 488.209 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gowa pada kurung waktu tahun 2010-2015 bertambah sebanyak 15.407 jiwa pertahun.

Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada pertengahan tahun 2018 berjumlah 760.607 jiwa yang terdiri dari 374.425 jiwa laki-laki dan 386.182 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan
Dan Jenis Kelamin Pertengahan Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bontonompo	20.186	22.091	42.277
2	Bontonompo Selatan	14.619	16.012	30.631
3	Bajeng	34.041	34.785	68.826
4	Bajeng Barat	11.989	12.668	24.657

5	Pallangga	62.507	63.827	126.334
6	Barombong	19.837	20.298	40.135
7	SombaOpu	85.986	86.108	172.094
8	Bontomarannu	17.504	17.744	35.248
9	Pattalassang	12.080	11.942	24.022
10	Parangloe	8.994	9.435	18.429
11	Manuju	7.256	7.763	15.019
12	Tinggimoncong	11.650	11.943	23.593
13	Tombolopao	14.682	14.263	28.945
14	Parigi	6.591	7.358	13.949
15	Bungaya	8.151	8.738	16.889
16	Bontolempangan	6.776	7.433	14.209
17	Tompobulu	14.832	16.044	30.876
18	Biringbulu	16.744	17.730	34.474
Jumlah		374.425	386.182	760.607

Sumber : Badan Pusat Statistik KabupatenGowa 2020

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan diberbagai aspek. Dalam konteks itu KabupatenGowa menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam pola dasar pembangunan KabupatenGowa dalam rumusan TerwujudnyaGowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya mewujudkan visi jangka Panjang dan visi konsistensi pemerintah daerah sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan ekonomi daerah sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2014 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis posisi KabupatenGowa yang berbatasan langsung dengan kota Makassar sebagai daerah pengembang dan peningkatan kualitas masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Visi yang dirumuskan pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 adalah terwujudnya Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan visi tersebut dirumuskan misi Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
- b. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi
- c. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat
- d. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Gowa secara bertahap melakukan upaya-upaya perubahan melalui kebijakan pembangunan yang mendorong percepatan meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan pembangunan daerah dilakukan secara terpadu, terarah dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah tingkat atas. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut pemerintah daerah menetapkan skala prioritas pembangunan daerah yang meliputi berbagai sector pembangunan dengan senantiasa mengedepankan asas pemerataan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada kepentingan untuk masyarakat. Hal ini dimaksud untuk memberi dampak kemajuan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan Bontomarannu

Kecamatan Bontomarannu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa. Daerah kecamatan Bontomarannu merupakan daerah dataran rendah dengan luas 19,03 km² dan berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 kecamatan Bontomarannu membawahi 6 desa dan 3 kelurahan yaitu Desa Bili-Bili, Romangloe, Nirannuang, Mata Allo, Sokkolua, Pakatto. Kelurahan Bontomanai, Borongloe, dan Romanglompoa. Ibu Kota Kecamatan Bontomarannu adalah Borongloe dengan jarak sekitar 9 km dari Sungguminasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Luas Tiap Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Bontomarannu

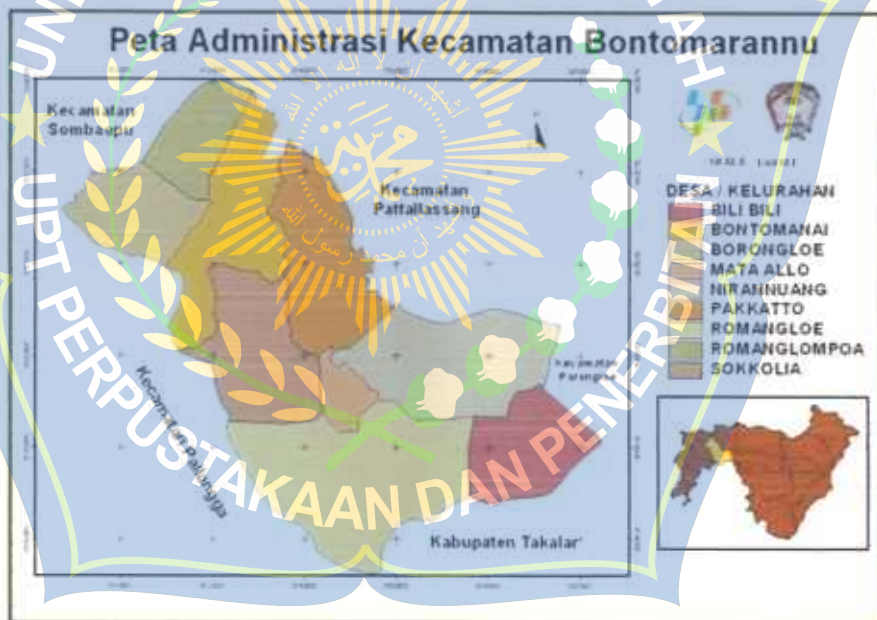
No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Borongloe	3,13
2	Bontomanai	6,33
3	Sokkolua	7,50
4	Pakatto	6,71
5	Nirannuang	9,20
6	Romangloe	9,29
7	Mata Allo	1,64
8	Bili-Bili	5,43
9	Romanglompoa	3,40
Jumlah		52,63

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2020

Adapun batas-batas kecamatan Bontomarannu, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pattallassang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Parangloe
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Somba Opu

Gambar 3 : Peta Wilayah Kecamatan Bontomarannu



Sedangkan jumlah penduduk di kecamatan Bontomarannu sampai pada pertengahan 2018 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa yaitu 35.248 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 17.504 jiwa dan perempuan 17.744 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Kecamatan Bontomarannu Menurut
Desa dan Jenis Kelamin Pertengahan 2020

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Borongloe	2.256	2.197	4.453
2	Bontomanai	2.361	2.440	4.801
3	Sokkolia	1.654	1.744	3.399
4	Pakatto	2.744	2.946	5.690
5	Niramuang	1.445	1.469	2.914
6	Romangloe	1.977	1.982	3.959
7	Mata Allo	1.010	969	1.979
8	Bili-Bili	1.146	1.117	2.263
9	Romanglompoo	2.911	2.879	5.790
	Jumlah	17.504	17.744	35.248

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa 2020

Penduduk Kecamatan Bontomarannu pada umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan secara sektor non pertanian umumnya bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang setiap tahunnya mencapai 100%.

Fasilitas Pendidikan di kecamatan Bontomarannu sendiri terbilang cukup lengkap karena tersedia beberapa SD/MIS, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6 : Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bontomarannu

2020

No	Desa	SD/MIS	SMP/MTS	SMA/SMK	Jumlah
1	Borongloe	1	-	-	1
2	Bontomanai	3	2	1	6
3	Sokkolia	1	1	-	2
4	Pakatto	3	-	-	4
5	Nirannuang	3	-	1	4
6	Romangloe	3	1	1	5
7	Mata Allo	1	-	-	1
8	Bili-Bili	-	-	-	1
9	Romanglompoa	3	1	1	5

referensi.data.kemdikbud.go.id/index2020

Sehubungan dengan Visi KabupatenGowadialas, maka dirumuskan Visi Kecamatan Bontomarannu yakni “Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Pelayanan Prima Profesional Dan Transfaran Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Visi Kecamatan Bontomarannu dijabarkan kedalam beberapa misi, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, dan pembinaan desa.
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.

Adapun tujuan dan sasaran kecamatan Bontomarannu berdasarkan misinya adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Misi 1

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kelurahan/desa, dengan sasaran: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa.

2) Tujuan Misi 2

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan/desa, dengan sasaran: meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan dan kelurahan/desa.

3) Tujuan Misi 3

Mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, dengan sasaran: berkembangnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga.

**B. Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020
Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8
Kabupaten Gowa**

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Kemdikbud Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa yang mengacu pada indikator implementasi menurut surat edaran No.15 tahun 2020 yaitu pedoman penyelenggaraan Belajar

Dari Rumah adalah bermuara pada aktivitas,aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

1. Memastikan Pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama covid 19

Memastikan hak peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan ber BDR dapat terlaksana apabila dapat direalisasikan jika ada kesesuaian antara sistem dan pengoperasian dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, suatu teknologi dapat dikatakan baik jika memiliki tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Salah satu teknologi yang digunakan SMAN 8 Kabupaten Gowa ialah teknologi classroom serta aplikasi yang dapat membantu siswa dalam mendapatkan layanan pendidikan. Teknologi-teknologi ini sendiri digunakan pada saat pemerintah mengeluarkan surat edaran no.15 tahun 2020 penyelenggaraan belajar dari rumah, hal ini dibenarkan dalam hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan I selaku Kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“Jadi sekolah itu mulai ber BDR pada pertengahan bulan maret 2020 ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran itu no.15 tahun 2020 jadi guru membelajarkan siswa dari rumah kerumahnya siswa secara online atau pembelajaran jarak jauh” (Hasil wawancara informan I, tanggal 2 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemberlakuan belajar dari rumah dilaksanakan ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah pertengahan maret dan teknologi yang digunakan pertama kali dimulai pada tahun 2020 atau pada saat di berlakukannya

BDR belajar dari rumah. Lebih jauh Kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten

Gowa kembali menambahkan :

“Selama pembelajaran itu secara daring pasti beda dengan pembelajaran yang biasanya tatap muka tetapi pelajaran tetap jalan, guru membuat jurnal, di jurnal itu ada foto kegiatan siswa melaksanakan tugas mengikuti pelajaran dengan teknologi aplikasi setiap guru kita persilahkan setiap guru memilih teknologi aplikasi mana yang paling di suka termasuk classroom dan banyak yang lain, saya juga minta guru untuk memvideokan dirinya jadi bukan yang di ambil di youtube tetapi memang dia yang sewaktu berhadapan dengan siswa seakan akan atau sama modelnya ketika dia menghadapi siswa di kelas bagaimana guru membuka pelajaran serta menjelaskan materi dan mengakhiri pelajaran lanjut informan I mengatakan laporan guru-guru pada saat menggunakan teknologi aplikasi tersebut langsung masuk ke saya dan saya melaporkan ke pimpinan dan dilakukan secara terus menerus sampai saat ini. Waktu pembelajaran tatap muka kita diberikan surat edaran untuk BDR dan diminta di tindak lanjuti sebagaimana kami mengawal siswa ini menggunakan teknologi atau handphone supaya bisa digunakan pada tempatnya kan tugas guru membelajarkan dan juga mendidik ketika guru melaksanakan tugas sebagai pendidik tentu dia memberikan himbauan-himbauan supaya hp itu digunakan bijaksana sangat hati-hati dan tentu juga siswa di tanamkan pendidikan karakter sehingga saya berharap guru itu menyampaikan jangan cuman membelajarkan siswa fokus memberi ilmu tetapi juga guru harus mendidik maka itu yang di utamakan menanamkan nilai-nilai karakter termasuk mengajak betul-betul menggunakan teknologi ini pada tempatnya” (Hasil wawancara informan I, tanggal 2 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi penggunaan teknologi ini adalah pada saat diberlakukannya BDR belajar dari rumah dari surat edaran no.15 tahun 2020 maka dari pada itu Kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa menghimbau guru-guru untuk menggunakan teknologi aplikasi ke siswa dan di laporkan kepada Kepala Sekolah langsung berupa video serta laporan BDR nya.

Pemberian tugas serta absensi siswa juga melalui teknologi aplikasi ini setiap senin sampai sabtu seperti jadwal sekolah pada umumnya. Hal itu dibenarkan oleh informan RRB selaku guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“Yang selama ini kami lakukan sejak pemberlakuan BDR yaitu dengan menggunakan pembelajaran online dengan menggunakan media teknologi pembelajaran yang cukup representatif bagi kami dan siswa diantaranya dengan menggunakan classroom serta aplikasi lainnya itu untuk pemberian tugas serta absen siswa yang kami share di aplikasi tersebut dan sekarang anak-anak atau siswa kami itu cukup mudah dalam menggunakan atau mengakses teknologi tersebut untuk pengawasan pemakaian teknologi aplikasi ini kami melihat absensi yang masuk kalau sudah 3 kali pertemuan mereka tidak ikut kami akan kordinasi dengan guru bk nya unuk menelusuri siswa tersebut atau mengunjungi rumah siswa tersbut ” (Hasil wawancara informan RRB, tanggal 3 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa ketika siswa menggunakan teknologi secara baik ataupun tidak dilihat dari masuknya absensi atau tugas yang masuk dalam handphone guru. informan SR selaku Guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa juga mengatakan bahwa :

“Menganai pembelajaran siswa kami memakai teknologi aplikasi oline seperi classroom atau aplikasi lainnya beserta tugas dan absensinya dan unuk penggunaan teknologi siswa sejauh ini saya liat siswa kalau menggunakan classroom hampir sebagian mereka itu sudah bisa dan terbiasa jadi kami mengontrol si a kan di aplikasi itu tercantum dimana siswa tersebut menggunakan aplikasi tersebut apakah mereka rajin mengerjakan tugas rajin dalam absensi tetapi juga ada siswa yang absennya jalan tetapi tugasnya tidak ada dan tidak selamanya tugas yang kami berikan misalnya ada pembelajaran baru atau materi baru kami berikan catatan dalam bentuk file atau foto di dalam aplikasi sehingga dapat mengontrol siswa bekerja atau tidak .” (Hasil wawancara informan SR, tanggal 3 Februari 2021).

Dari tambahan hasil wawancara dengan informan SR selaku guru SMAN 8 Kabupaten Gowa mengetahui siswa dalam menggunakan

teknologi itu dengan mengontrol tugas-tugas serta catatan yang mereka kumpulkan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa dapat diketahui pelayanan pendidikan selama BDR di dapatkan oleh siswa dan mereka lebih paham menggunakan teknologi maupun aplikasi yang di pakai cara pengontrolan guru dengan melihat tugas serta absen yang masuk apakah mereka benar-benar mengerjakan atau tidak serta guru-guru juga membimbing muridnya dalam menggunakan teknologi yang seperti di katakan oleh Kepala Sekolah guru-guru harus membimbing siswanya dalam menggunakan teknologi dengan lebih bijak.

2. Melindungi warga satuan pendidikan dari pencegahan covid 19

Harus ada kesesuaian antara guru dan lingkungan sekolah dalam menjaga dari dampak buruk pandemi covid 19 serta menjelaskan dalam menggunakan teknologi aplikasi pelajaran ataupun mengontrol pemakaian siswa dalam berteknologi serta mengingatkan dala menjaga protokol kesehatan karna guru serta lingkungan sekolah bertanggung jawab atas murid yang dia ajar sehingga dalam proses tumbuh siswa dalam memahami pemakain teknologi berjalan baik dan untuk mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan M selaku guru SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“Mengenai menjaga dari pandemi ini kami juga guru-guru selalu mengingatkan siswa dalam menjaga protokol kesehatan serta

mengingatkan tugas dan absensi nya siswa kami menggunakan aplikasi tergantung kemampuan anak-anak karna tidak semua siswa mendapatkan kouta yang banyak makanya semampu siswa tersebut dalam mengirimkan tugas serta absennya di aplikasi mana saja karna perbedaan pemakaian data untuk aplikasi lain untuk 1 kelas pasti ada yang tidak mengirimkan tugas serta absennya maka dari pada itu di laporkan kepada guru bk nya mengontrol kenapa tidak ada absensi masuk, saya sendiri dalam mengontrol teknologi siswa kita lihat apakah siswa tersebut mengirim tugas atau tidak” (Hasil wawancara informan M, tanggal 4 Februari 2021).

Hal senada juga disampaikan informan AA sebagai guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa yang mengemukakan bahwa :

“Dalam hal mengingatkan protokol kesehatan serta pemberian tugas kepada siswa, catatan dan absen bervariasi tidak monoton 1 aplikasi saja dan untuk absennya siswa kirim online ke kurikulum absen mengajar ataupun absen siswa, untuk pengontrolan siswa menggunakan teknologi saya rasa sudah bagus untuk pengaitan kehidupan sehari-hari karna mereka anak-anak sekarang sudah mampu menggunakan teknologi pengetahuan mereka tentang teknologi itu sudah jauh di atas guru-gurunya kedisiplinannya juga sangat tinggi karna mereka lebih paham aplikasi” (Hasil wawancara informan AA, tanggal 4 Februari 2021).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan D selaku orang tua siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan :

“Iya anak-anak sekarang belajar dari rumah karena pandemi yang sedang terjadi penggunaan hp nya anak juga semakin bertambah biasa juga anak itu mengerjakan tugas sambil kita pantau”(Hasil wawancara informan D, tanggal 8 Februari 2021).

di SMAN 8 Kabupaten Gowa diketahui bahwa guru dan orang tua siswa sama-sama mengontrol anaknya dalam menjaga protokol kesehatan serta mengerjakan tugas dari arahan guru dalam penggunaan teknologi maupun aplikasi di handphone nya.

3. Mencegah Penyebaran dan Penularan Covid 19 di satuan pendidikan

Dalam pencegahan ini lingkungan sekolah pun melaksanakan protokol kesehatan juga, di karenakan guru juga mengajar melalui aplikasi dari sekolah penggunaan teknologi di lingkungan sekolah maupun terhadap siswa kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari guru dan sekolah dapat tercapai. Target atau kelompok sasaran dari pemakaian teknologi ini yang dilaksanakan di SMAN 8 Kabupaten Gowa haruslah jelas. Dan untuk mengetahui hal itu maka peneliti melakukan wawancara dengan informan I selaku kepala sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa mengemukakan bahwa:

“Kita mau bukan cuman kami saja yang diperintahkan untuk menjaga protokol kesehatan serta mengontrol siswa dalam melaksanakan tugas atau siswa dalam menggunakan handphonenya tetapi guru-guru juga berharap orang tua siswa dirumah bisa mengontrol anaknya dalam mengerjakan tugas” (Hasil wawancara informan I, tanggal 2 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa orang tua siswa juga mengalami sasaran utama sekolah dari BDR ini penggunaan teknologi siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa ini serta orang tua siswa juga dapat mengontrol anaknya dalam mengerjakan tugas.

Dan untuk mengetahui bagaimana orang tua siswa dalam mengontrol anaknya dalam mengingatkan protokol kesehatan mengingatkan dalam mengerjakan tugas sebagai kewajiban siswa maka peneliti melakukan wawancara dengan informan L selaku orang tua siswa mengemukakan bahwa :

"Sekarang ini anak-anak belajar dan mengerjakan tugas melalui handphone nya yang di kerjakan dirumah kami juga mengingatkan selalu mencuci tangan, alhamdulillah anak-anak sendiri selalu melakukan itu dan mengerjakan tugasnya, kami pantau atau lihat dia saat mengerjakan tugas sampai mereka selesai tetapi lebih beda karna guru tidak langsung bertatap muka dengan muridnya" (Hasil wawancara informan L, tanggal 8 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui orang tua siswa juga mengontrol anaknya dalam mematuhi protokol dan mengerjakan tugas sehingga anak betul-betul mengerjakan tugas dari gurunya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan IH selaku orang tua siswa lain mengatakan bahwa :

"Biasa ketika anak dapat tugas dari gurunya kami mengawasi dalam pengerjaan tugasnya serta melihat apakah dia megggunakan handphone untuk mengerjakan" (Hasil wawancara informan IH, tanggal 8 Februari 2021).

Hal ini juga di sampaikan Informan D sebagai orang tua siswa mengatakan pula bahwa

"Kalau saya dengan kaka nya gantian untuk pengawasan penggunaan handphone adiknya nya dan handphone saya juga yang dia pakai jadi kami mengawasi terus apakah dia mengerjakan tugas dari gurunya atau tidak karna sangat beda anak-anak ketika di sekolah dengan dirumah pengawasannya lebih ketat kalau di sekolahh mengenai teknologinya anak-anak juga dan lebih fokus kalau di ajarkan langsung oleh gurunya" (Hasil wawancara informan D, tanggal 8 Februari 2021).

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tua siswa adanya kontrol dari orang tua kepada anaknya dalam membimbing penggunaan teknologi siswa dengan cara melihat apakah anaknya mengerjakan tugas yang di berikan oleh gurunya melalui handphone siswa ataupun handphone orang tua siswa itu sendiri.

4. Memastikan Pemenuhan Dukungan Psikososial Bagi Pendidik, Peserta Didik, dan Orang tua/wali

Dalam hal ini untuk memastikan semua mendapatkan dukungan serta saling membantu mendukung agar dapat menjalankan pendidikan dalam keadaan pandemi ini maka peneliti melakukan wawancara oleh informan I selaku kepala sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa mengemukakan bahwa:

“Kami mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal surat edaran yang di edarkan oleh pemerintah serta menjaga protokol kesehatan di lingkungan sekolah, para guru juga ketika memberi tugas kepada siswa, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan mengisi absen onlinenya yang kami lakukan adalah menugaskan guru yang bersangkutan datang ke rumah siswa tersebut untuk menanyakan serta memberi solusi dalam setiap masalah siswa” (Hasil wawancara informan I, tanggal 2 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah pun mendapatkan dukungan dari pemerintah, serta lingkungan sekolah sendiri melakukan dukungan kepada siswa dengan cara mengunjungi rumah siswa agar dapat diketahui permasalahan yang dialami siswa. Dan untuk mengetahui hal itu maka peneliti melakukan wawancara dengan informan RRB selaku guru mengemukakan bahwa:

“Kami melihat di absennya kalau mereka jarang misalnya sudah 3 kali pertemuan mereka tidak ikut kami koordinasi dengan guru bk nya untuk menelusuri siswa tersebut misalnya kami melakukan kunjungan rumah itu kalau siswa tidak hadir sama sekali atau minimal 3 kali kordinasi dengan guru bk nya unuk menelusuri siswa tersebut atau mengunjungi rumah siswa tersbut ” (Hasil wawancara informan RRB, tanggal 3 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah pun memberi dukungan kepada siswa yang sedang melakukan BDR selama pandemi covid 19.

C. Faktor-faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa

Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa, maka dapat dilihat dari segala hal yang mendukung dan mendorong pengimplementasian Kebijakan BDR bagi siswa di SMAN 8. Sementara faktor penghambat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pengimplementasian Kebijakan BDR bagi siswa di SMAN 8. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang mendukung dan mendorong Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan I selaku kepala sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan ini belajar dari rumah siswa ialah dengan adanya Surat edaran pemerintah dalam melaksanakan BDR belajar dari rumah” (Hasil wawancara informan I, tanggal 2 Februari 2021).

Dari hasil wawancara dengan informan I selaku kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendukung siswa dalam menggunakan teknologi sebagai bahan untuk belajar dari rumah adalah dengan adanya dasar hukum pelaksanaannya yang tertuang dalam Surat edaran pemerintah dalam melaksanakan BDR. Selanjutnya untuk mengetahui penggunaan teknologi siswa maka peneliti melakukan wawancara dengan informan SR selaku guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa yang mengemukakan bahwa :

“Kami juga di dorong oleh kepala sekolah untuk bagaimana mengontrol siswa maupun siswa di rumah tetapi ada video atau bukti dia telah mengerjakan tugasnya sehingga kami juga dapat mengontrol siswa tersebut.” (Hasil wawancara informan SR, tanggal 3 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMAN 8 maka diketahui bahwa hal-hal yang mendukung ialah terkoordinasi dan terlampir nya tugas-tugas siswa oleh guru ke kepala sekolah sendiri sehingga dalam mengontrol siswa dapat berjalan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan orang tua siswa untuk mengetahui hal-hal yang mendukung bagaimana mengontrol siswa dalam menggunakan teknologi, informan D selaku orang tua siswa mengatakan bahwa :

“Karna anak sendiri memakai handphone saya untuk mengerjakan tugas dari gurunya makanya gampang untuk megawaasi apakah dia belajar atau betul-betul menggunakan teknologi itu dengan baik” (Hasil wawancara informan D, tanggal 8 Februari 2021).

Dari hasil wawancara guru dan orang tua siswa diketahui bahwa yang menjadi pendukung pelaksanaan penggunaan teknologi siswa ialah semua pihak yang terlibat mulai dari kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa itu sendiri.

2. Faktor Penghambat

Pada penelitian ini faktor penghambat dapat dilihat dari berbagai kendala yang ditemukan dalam proses Implementasi Kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui faktor penghambat tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan M selaku guru di SMAN 8 Kabupaten Gowa mengatakan bahwa :

“Kendala yang kami dapatkan dari BDR ini yaitu jaringannya siswa yang berbeda-beda karna bisa saja dia terkendala jaringan atau permasalahan di rumahnya sehingga dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan” (Hasil wawancara informan M, tanggal 4 Februari 2021).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hal yang menghambat atau kendala dalam mengontrol siswa menggunakan teknologi ialah jaringan yang berbeda-beda setiap siswa dan masalah-masalah didalam lingkungan rumah siswa itu, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan D selaku Orang tua siswa SMAN 8 Kabupaten Gowa mengemukakan bahwa :

“Hambatan atau kendala dalam mengontrol anaknya ialah karna anak sendiri mempunyai handphone juga dan terkadang dia mengerjakan tugas itu di rumah temannya jadi saya tidak tau

bagaimana dia mengerjakan tugas di sekolahnya kalau dia tidak di rumah” (Hasil wawancara informan D, tanggal 8 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan D selaku orang tua siswa SMAN 8 Kabupaten Gowa diketahui bahwa faktor penghambat atau kendala mengontrol siswa dalam penggunaan teknologi ialah ketika anaknya tidak mengerjakan tugasnya di rumah melainkan di rumah temannya.

Secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Teknologi Terhadap Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa dukungan karena adanya regulasi yang jelas. Adanya dukungan regulasi dari pemerintah Kabupaten yang tertuang berdasarkan Surat edaran BDR Instruksi pemerintah tentang belajar dari rumah.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Implementasi Teknologi Terhadap Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa yaitu berbedanya jaringan siswa dan kurangnya jam pembelajaran dari sekolah sehingga guru tidak mengetahui apakah siswa dapat mengerjakan atau menggunakan teknologi dengan baik atau tidak.

C. Pembahasan

Dari 4 indikator yang ada dapat di analisis dari faktor penghambat serta faktor pendukung seperti :

- a. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama covid 19
materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing- masing, termasuk memperimbangan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR.
- b. Melindungi warga satuan pendidikan dari pencegahan covid 19
BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi covid19, serta mencegah dari penularan virus covid 19.
- c. Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 di satuan pendidikan
Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR.
- d. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta pendidik, peserta didik dan orang tua/wali

Suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara gurudengan orang tua/wali.

Sedangkan menurut Edward iii dalam Arifin (2016) faktor penghambat dan pendukung dalam pendekatan studi implementasi kebijakan dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik

a. Faktor pendukung

1) Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diberlakukan pada berbagai macam elemen masyarakat dan lembaga masyarakat, baik itu untuk keperluan umum atau untuk kepentingan bisnis. Namun secara umum, istilah kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, regulasi aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku dalam menjalankan kebijakan. Regulasi dibuat melalui

proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku para pengusaha dan konsumen dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi tersebut bersifat mengikat dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam ruang lingkup kebijakan yang jelas dalam penerapan pembelajaran daring belajar dari rumah oleh pemerintah pusat dari keluarnya surat edaran kemdikbud no.15 tahun 2020 penyelenggaraan belajar dari rumah adanya keselarasan bagi pemerintah setempat yang telah mengeluarkan yaitu surat no.188 perihal tindak lanjut pencegahan penularan covid 19 di Kabupaten Gowa mempertimbangkan pembelajaran serta meliburkan proses pembelajaran sehingga dapat mencegah penularan dari virus covid 19 itu sendiri. Karena kebijakan apa saja harus melalui regulasi yang jelas dalam pengeluran suatu kebijakan.

2) Penggunaan dan pemahaman berteknologi

merupakan alat utama yang digunakan guru selama proses pembelajaran daring. Adanya teknologi akan mempermudah guru untuk memberikan materi dan intruksi-intruksi terkait dengan proses pembelajaran. pembelajaran daring siswa lebih banyak mengerti persoalan pemakaian gawai atau teknologi sehingga Sumber belajar lebih luas, tidak hanya terbatas dari buku pegangan. Dengan penggunaan internet pembelajaran daring siswa lebih banyak mengerti persoalan pemakaian

gawai atau teknologi sehingga Sumber belajar lebih luas, tidak hanya terbatas dari buku pegangan. Dengan penggunaan internet membuat siswa lebih leluasa untuk mencari sumber belajar lain. Siswa dapat belajar di mana saja, baik di dalam ruangan maupun di luar. Pemakaian teknologi juga dapat membantu serta menyulitkan pemakainnya tergantung internet yang digunakan teknologi tersebut sehingga ada perbedaan yang di dapat oleh pengguna teknologi sehingga harus ada keselarasan dari teknologi dengan internet yang digunakan sehingga dapat digunakan dengan baik. Hal ini memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas sambil mengerjakan pekerjaan rumah.

b. Faktor penghambat

1) Sumber daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Wewenang di sini terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif, karena tidak sedikit pelaksana kebijakan memiliki wewenang formal yang besar tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyediaan fasilitas tersebut. Sedangkan untuk kualitas finansial dan tenaga sendiri cukup baik. Sikap ini akan

menurunkan resistensi bagi lingkungan serta dari masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan. Fasilitas seperti sarana dan prasarana seperti fasilitas fisik ketersediaan *handphone* atau fasilitas internet seperti bentuk jaringan internet dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, dan wewenang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif dari memberi bantuan pembelajaran sampai memahami penggunaan teknologi.

2) Komunikasi

menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Serta ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu

keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Serta dalam menjalankan implementasi kebijakan ini harus mengutamakan yang namanya protokol kesehatan Menurut Jessica Moudy, Rizma Adilla Syakurah (2020) cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor faktor yang bisa menyebabkan dan terinfeksi virus ini, yaitu:

- a. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- d. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- e. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian

buang tisu ke tempat sampah

Dan mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1) Jaga kebersihan tangan

Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor.

2) Jangan menyentuh wajah

Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut.

3) Terapkan etika batuk dan bersin

Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita.

4) Pakai masker

Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ke mana pun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

5) Jaga jarak

Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

6) Isolasi mandiri

Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah.

7) Jaga kesehatan

Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa di SMAN 8 Kabupaten Gowa, menunjukkan dari empat indikator yaitu (a)Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama covid 19.

Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing- masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR.

(b) Melindungi warga satuan pendidikan dari pencegahan covid 19 BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi covid19, serta mencegah dari penularan virus covid 19. (c) Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 di satuan pendidikan Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga

satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. (d) Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta pendidik, peserta didik dan orang tua/wali. Suatu kemampuan tiap diri individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

Terkait dengan Implementasi Kebijakan BDR kepada lingkungan sekolah dengan melihat indikator tersebut diatas, bentuk Implementasi Kebijakan BDR lebih kepada bagaimana menjaga dari pencegahan virus covid 19. Implementasi Kebijakan BDR ini bertujuan agar siswa selama pandemi mendapatkan hak layanan pendidikannya, serta menjaga guru dan siswa dari penularan virus covid 19.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan :

1. pemerintah atau sekolah yang terkait, sebaiknya lebih mengedepankan layanan pendidikan bagi siswa agar siswa mendapatkan haknya dalam pembelajaran dari rumah.
2. Pemerintah atau sekolah terkait sebagai pengayom siswa sebaiknya lebih peka terhadap pencegahan virus serta menjaga protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta), h. 8.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik Implementasi*. Malang: Alfabeta.
- Annurahman. (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta CV.
- Arifin, Zainal. (2016). *Implementasi Kebijakan* (Prinsip, Teknik, dan Prosedur). Jakarta: Rosda Karya.
- Aulia, Listya Rani. (2016). *Implementasi Nilai Religius Dalam Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik Di Sekolah Dasar Juara Yogyakarta. Skripsi S-I*. Yogyakarta: UNY.
- Bilfaqih, Yusuf dan Nur Qomarudin. (2015). *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiharto, Widodo. (2014). *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Budi, Winarno. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Chalim, Saifuddin dkk. (2018). *Peran Orang tua dan Guru dalam Membangun Internet sebagai Sumber Pembelajaran (The Role of Parents and Teachers in Building the Internet as a Source of Learning)*. Jurnal Penyuluhan, 14(1).
- Dina Indriana. (2011). *Ragam Alat Bantu Media Pengajaran*. Yogyakarta: Diva Press.
- Eko Riswanto. (2007). *Analisa dan Perancangan Sistem*. Yogyakarta : STMIK El Rahma.
- Handoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Hanifah Harsono, (2002), *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hanum, Numiek Sulistyo. 2013. Keefektifan E-learning Sebagai Media Pembelajaran (Studi Evaluasi Model Pembelajaran E-learning SMK Telkom Sandhy Putra Purwokerto). *Jurnal Pendidikan Vokasi*, Vol. 3, Nomor 1.
- Hamalik, Oemar. (2007). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- H.M. Hasbullah. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Indriana, Dina, (2011). *Rragam Alat Bantu Media Pengajaran: Mengenal, Merancang dan Mempraktikkannya*. Kuningan: Diva.Press.
- Kuntarto, E. (2017). *“Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Aspek Learning Design dengan Platform Media Sosial Online Sebagai Pendukung Perkuliahan Mahasiswa”*. Jambi: Diva.Press.
- M Sahari Besari. (2008). *Teknologi di Nusantara 40 Abad HambatanInovasi*. Jakarta: Salemba Teknika.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Nazarudin. (2008). *Manajemen Teknologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ni'mah. 2016. *Peranan Orang Tua Dalam Membimbing Anak Untuk Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Lingkungan Pasar Kahayan Palangka Raya (Studi Terhadap Lima Kepala Keluarga yang Berprofesi sebagai Pedagang)*. Palangka Raya: Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Palangka Raya.
- Nugroho, Adi. (2003). *Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data*, Jakarta:Andi.
- Nugroho, Riant. (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rohman, Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- R. Sebayang, (2020). *Awat! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Sanjaya, Wina, (2020). *Strategi Pembelajaran*, Jakarta:Cempaka putih. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Jakarta:Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Praktik (Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Penerbit Alaf Riau, Graha Unri Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*.

Bandung: PT Rosdakarya.

Subarsono, (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*.
Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tahir, A. (2014). *Analisis implementasi kebijakan empat pilar pengembangan Universitas Negeri Gorontalo*. Penelitian Dana PNB.

Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Usman Nurdin, (2002) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Usman, Nurdin. (2008). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo: Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : PT. Bumi Akasara.

Waluyo, (2007). *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju. Bandung.

Wikan Aditya, (2016). *Konsep dan Implementasi G U I*. Jakarta:Andi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota,
di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19; dan
2. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Mei 2020

Sekretaris Jenderal,

REPUBLIK
INDONESIA

Ainun Na'im

NIP. 19601204 198601 1001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI
RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BAB I

TUJUAN, PRINSIP, METODE DAN MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI
RUMAH

- A. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
- Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:
1. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
 2. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
 3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan
 4. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.
- B. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
- BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), yaitu:
1. keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
 2. kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
 3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
 4. materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
 5. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
 6. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan

7. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

C. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:

1. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)
2. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

1. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring

Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya:

a. Informasi terkait COVID-19

NO.	SUMBER INFORMASI	TAUTAN
1.	Informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	https://covid19.go.id/
2.	Portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19	http://bersamahadapikoron.a.kemdikbud.go.id/

b. Media Pembelajaran Daring

NO.	SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
1.	Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud.	https://belajar.kemdikbud.go.id
2.	TV edukasi Kemendikbud.	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
3.	Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC Kemendikbud.	http://rumahbelajar.id
4.	Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud.	pusdatin.webex.com .
5.	LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud.	http://lms.seamolec.org
6.	Aplikasi daring untuk paket A,B,C.	http://setara.kemdikbud.go.id/
7.	Guru berbagi	http://guruberbagi.kemdikbud.go.id
8.	Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
9.	Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
10.	Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/

NO.	SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
11.	Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
12.	Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/
13.	Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/
14.	Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
15.	Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/me-dukasi/
16.	Modul Pendidikan Kesetaraan	https://emodul.kemdikbud.go.id/
17.	Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.	https://sumberbelajar.seamolec.org/
18.	Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC.	http://mooc.seamolec.org/
19.	Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	http://elearning.seamolec.org/
20.	Buku digital <i>open-access</i>	http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/>

2. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring
Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:
 - a. televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI;
 - b. radio;
 - c. modul belajar mandiri dan lembar kerja;
 - d. bahan ajar cetak; dan
 - e. alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

D. Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19.

Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi COVID-19:

NO.	NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
1.	PeduliLindungi	Aplikasi pemantauan COVID-19. Dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19.	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=in

NO.	NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
2.	Inariks Personal	aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan disekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inarisk.bnbp&hl=in
3.	SehatPedia	Aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring (telemedicine). Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sehatpedia.apps&hl=in





KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Laporan oleh guru siswa belajar dari rumah (BDR)



Laporan dan Kegiatan siswa belajar dari rumah (BDR)



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 8 Kabupaten Gowa bapak
ISLAMUDDIN, S.Pd., M.Pd.



Wawancara dengan Guru ibu Rahmah Radjab Bakri, S.Pd.



Wawancara dengan Guru ibu Sitti Rachmawaty, S.Pd.



Wawancara dengan guru ibu Megawati, S.Pd.



Wawancara dengan guru ibu Dra Andi Azrini



Wawancara dengan orang tua siswa ibu Dewi dg Rannu



Wawancara dengan orang tua siswa bapak Lukman



Wawancara dengan orang tua siswa ibu Irnawaty Hadi



Wawancara dengan orang tua siswa ibu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MUH TESAR SYARIF, di lahirkan di Ujung Pandang pada hari kamis 1 Juni 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Syarifuddin dan Sari Puspita. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Furqan pada tahun 2003, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD NEGERI PEMDA 7 pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya di MTsN Banjar Selatan 01 tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA NEGERI 13 BANGKALAN pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya yaitu ke Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan 2015. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **"Implementasi Kebijakan Kemdikbud No.15 Tahun 2020 Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Bagi Siswa Di SMAN 8 Kabupaten Gowa"**.